

# Pasang Naik Arus Bawah

**A**rus bawah” mendadak jadi semacam momok bagi sebagian orang. Khususnya bagi mereka yang merasa berada bukan saja di “arus atas”, tapi malahan di “atas (segala) arus”. Untuk menetralisasi gelombang pasang naik “arus bawah” ini, berbagai siasat diupayakan. Ada yang mencoba merongrong legitimasinya dengan menuding “arus bawah” sebagai “rekayasa” pihak-pihak tertentu yang tak bertanggung jawab. Siapa mereka? Tak jelas dan mungkin sengaja tak dibikin jelas agar secara samar-samar menumbuhkan momok tandingan di alam fantasi kita masing-masing.

Banyak yang berbisik-bisik, apa arus-arus yang lain juga bukan rekayasa? Ada baiknya kita tak berhenti di situ. Ada sejumlah pertanyaan lain yang lebih mendasar. Bukan sekadar siapa saja yang “terlibat” dalam lomba rekayasa aneka arus masyarakat.

Apa benar sudah atau sedang terjadi pasang naik, kalau bukan banjir, “arus bawah” yang luar biasa? Kalau benar ada, pertanyaan berikut ialah apa benar arus semacam itu perlu atau dapat direkayasa dan ditunggangi pihak luar dari mana pun? Kalau benar ada bukti rekayasa semacam itu, apa hal itu salah? Dan kalau itu salah, apa dasar penilaiannya? Hukum? Moral? Teknis?

Barangkali kita tak akan menemukan jawaban yang pasti. Dengan menyenggol soal itu, kita malahan diberondong pertanyaan-pertanyaan baru. Misalnya, benarkah sedang ada “arus bawah” yang mengguncang *status quo* (terlepas ada-tidaknya rekayasa)? Ataukah yang ada hanya semacam fantasi orang atas yang sedang menderita paranoia akan menggeliatnya dendam arus dari bawah?

Orang bisa menunjuk dengan perasaan pasti gejala-gejala “obyektif” belakangan ini, gencarnya gelombang demonstrasi mahasiswa, petani, dan buruh. Belum lagi berbagai aksi kekerasan amuk secara massal di pusat-pusat konsumsi kemewahan elite Jakarta. Baik secara kuantitas, frekuensi maupun kualitas, terjadi penanjakan grafik secara tajam. Mungkin belum pernah ada gejala serupa dalam sejarah Orde Baru dengan otentisitas “kaum bawah” dan skala seperti itu.

Sejumlah skor, kalau bukan rekor, kemenangan telah tercatat dari perjuangan mereka. Daftar yang lengkap perlu dibuat secara seksama. Kita mulai dari yang masih panas dan belum tuntas yakni kasus pembunuhan Marsinah. Korban pembunuhan bukan saja datang dari “arus bawah” tapi, yang lebih penting, tenaga lo-



Ariel Heryanto  
Dosen Pascasarjana Universitas  
Kristen Satya Wacana

kal dari “arus bawah”-lah yang mengangkat kasus itu ke langit-langit diplomasi politik internasional.

Masih di sekitar Ibu Kota Jawa Timur, kita ingat “arus bawah” *ngotot* menobatkan Megawati sebagai pemimpin sebuah partai “nonpemerintah”. Biarpun Megawati tak datang dari lapisan bawah, kekuatan rakyat yang tahan banting dan teror itulah yang memungkinkan dia jadi pemimpin.

Sebelum semua kasus itu, skor kemenangan “arus bawah” sudah bertumpuk. Pembubaran SDSB, kasus berdarah di Dili, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menguatnya organisasi serikat buruh di luar Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

(khususnya Serikat Buruh Merdeka Setiakawan), konsesi pemerintah dalam kasus Kedung Ombo, pelunakan sikap pemerintah dalam soal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, kemudian gurnya RUU Perizinan. Bandingkan semua itu dengan masa ketika pemerintah menginginkan asas tunggal diterima, atau fusi partai, atau NKK/BKK. Apalagi massa mengambang.

Serunya tuding-menuding para pejabat hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus restitusi pajak kelihatan tak bersangkut paut dengan “arus bawah”. Mungkin. Tapi, kita bisa berdebat soal ini. Sebuah konflik di tingkat atas tak pernah terlepas dari dinamika di lapisan bawahnya. Ia bukan saja bisa meluber atau menetes ke bawah. Tapi, ia juga dirangsang dan diberi tenaga oleh lapisan yang lebih bawah.

Konkritnya begini. Coreng-moreng citra lembaga peradilan di Surabaya bisa menjadi fokus utama dalam media massa berkat jasa sejumlah peristiwa lain. Tidak semua. Tapi, sebagian peristiwa lain itu melibatkan “arus bawah” sebagai tokoh sentral.

Mulai dari pengadilan kasus Marsinah hingga sorak sorai solidaritas kaum demonstran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas sesama mahasiswa demonstran. Melecehkan lembaga peradilan atau tuduhan orang akan pelecehan demikian bukan gejala baru. Tapi, baru belakangan, kasus itu digugat dengan semangat baru dalam konteks historis yang khusus.

Sebaiknya gelegar konflik semacam apa pun di tingkat atas tak banyak artinya bila tak disambut partisipasi lapisan-lapisan di bawahnya. “Arus bawah” sering kali terlalu kuat dan liar untuk ditangani, dibujuk atau diajak berunding oleh “arus atas”. Hanya kenaifan atau keangkuhan “arus atas” yang bisa menumbuhkan anggapan bahwa “arus bawah” bisa direkayasa olehnya.

